

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi masyarakat Indonesia dan menjadi perhatian penting dalam proses pembangunan, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, serta stabilitas ekonomi. Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga berdampak pada terbatasnya peluang kerja dan rendahnya produktivitas. Hal tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka yang menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan. Kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi juga turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi sosial maupun ekonomi (Andriani, 2019). Selama ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, baik melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Secara umum, strategi pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung. Kedua,

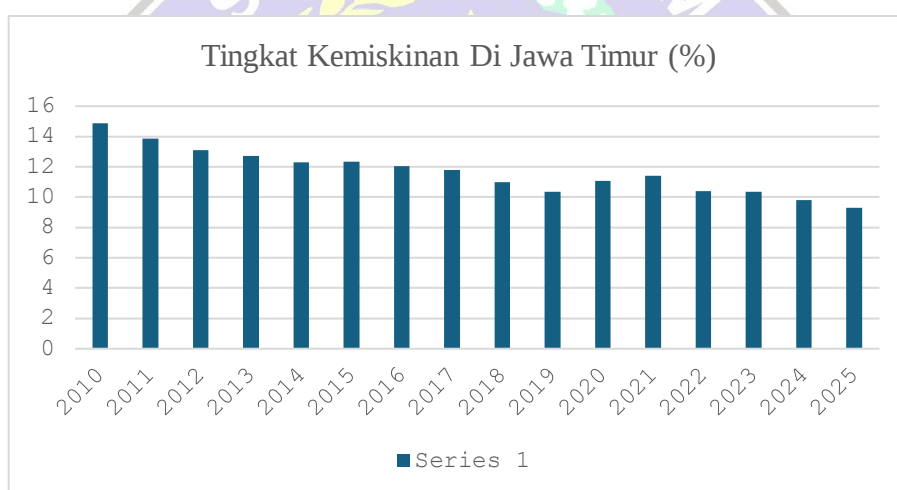
meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi agar mereka mampu mandiri serta mencegah munculnya kemiskinan baru (Ferezagia, 2018).

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pada umumnya menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang bersifat esensial (R. Susanto, 2020). Kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar yang menunjang kualitas hidup.

Kondisi kemiskinan seperti ini umumnya terjadi di negara berkembang, dimana kualitas sumber daya manusia yang masih belum optimal turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya taraf hidup penduduk menyebabkan keterbatasan dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara produktif, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kondisi ekonomi secara umum. pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi (Halizatunnisa et al., 2025). Namun demikian, tingkat kemiskinan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan dan kompleks. Provinsi Jawa Timur merupakan

salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Penting untuk menganalisis perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dari waktu ke waktu.

Berikut disajikan grafik persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama periode 2010–2025 sebagai gambaran mengenai dinamika tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

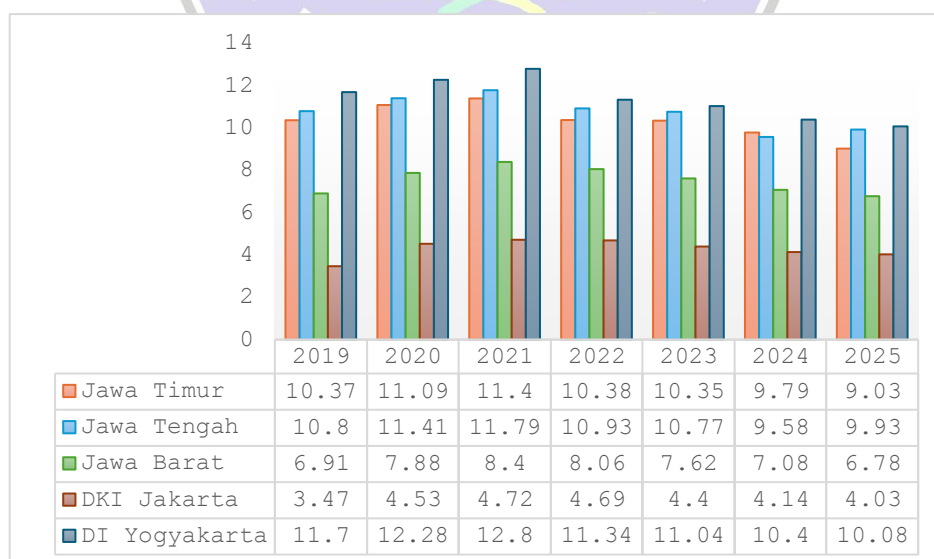


Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2025

### **Gambar 1 Persentase Tingkat Penduduk Miskin**

Berdasarkan Gambar 1, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,87%, kemudian secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai 5,57% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun prosesnya berlangsung secara bertahap dan tidak terlepas dari berbagai dinamika

ekonomi yang terjadi selama periode tersebut. Menurut (Ferezagia, 2018), penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit, yang berarti kondisi kemiskinan menjadi relatif lebih merata di dalam kelompok tersebut. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi juga tingkat keparahan kemiskinan mengalami perbaikan. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Timur beberapa kali masih mencatat tingkat kemiskinan yang berada sedikit di atas atau mendekati rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi, agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

**Gambar 2 Presentase Tingkat Penduduk Miskin**

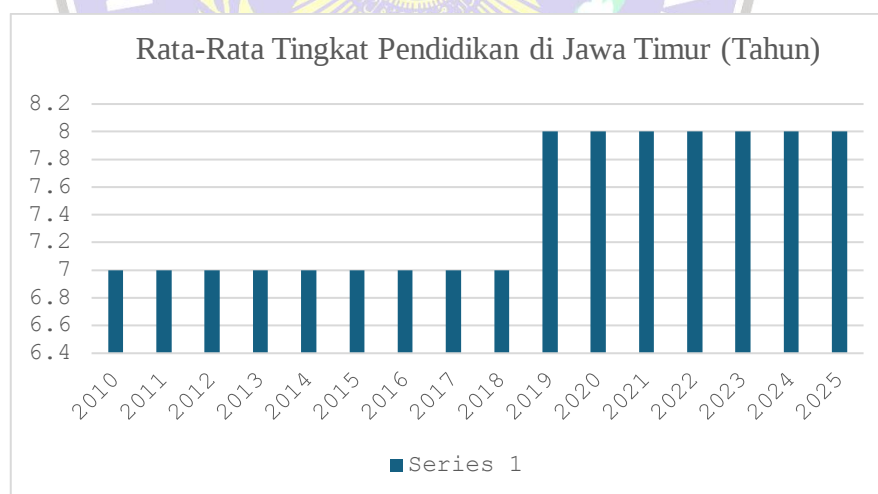
Berdasarkan Gambar 2, persentase penduduk miskin di lima provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019–2025 menunjukkan pola yang relatif serupa. Pada tahun 2019 hingga 2021, seluruh provinsi mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Memasuki periode setelah tahun 2021, tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi mulai menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian, meningkatnya aktivitas produksi, serta adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dan cenderung berimbang dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, meskipun keduanya juga mengalami tren penurunan pascapandemi.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk miskin, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Pendidikan memberikan kemampuan, keterampilan, serta kesempatan bagi individu untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sembiring et al., 2023). Pendidikan seringkali dipandang sebagai salah satu

instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan serta menjadi bagian penting dalam tujuan pembangunan suatu negara.

Namun demikian, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pengelolaan maupun pelaksanaan proses pembelajaran (Handayani, 2025). Permasalahan tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010–2025, tingkat pendidikan di wilayah ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh tingkat pendidikan, bersama dengan faktor ekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi, terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2025

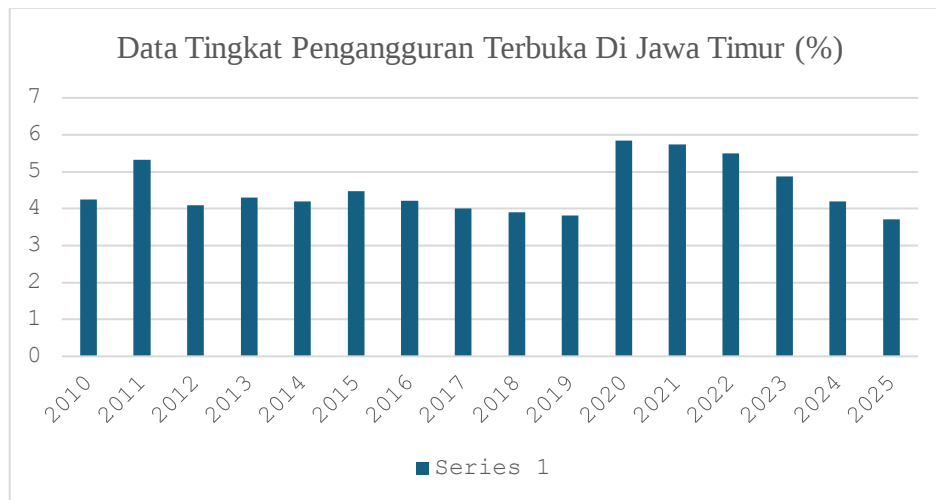
### **Gambar 3 Rata-Rata lama sekolah**

Berdasarkan gambar 3, rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 7 tahun. Sehingga dapat diartikan pada tahun tersebut rata-rata penduduk wilayah Provinsi Jawa Timur menamatkan pendidikan hingga kelas

1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1% dapat diartikan rata-rata penduduk wilayah Provinsi Jawa Timur Menamatkan pendidikan hingga kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terlambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingginya angka kemiskinan yaitu tingkat pengangguran terbuka (Sembiring et al., 2023). Pengangguran terbuka dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain (a) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. Kedua, jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek (Sembiring et al., 2023).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik setelah provinsi Jawa Barat (BPS Indonesia, 2025). Dari tahun 2010 – 2025 pengangguran terbuka di Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah.



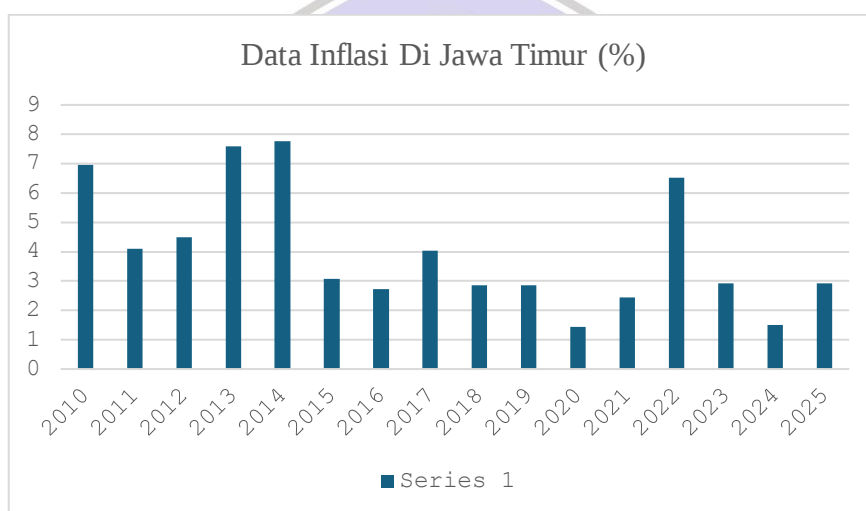
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

**Gambar 4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 4,25%, angka tersebut menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif sehat dan stabil serta hanya sekitar 4 dari 100 orang dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka didorong oleh pertumbuhan industri dan investasi, memberikan harapan bagi generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dalam data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2010-2025 mengalami penurunan 0,54%. Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan (BPS Jawa Timur 2025).

Faktor Inflasi menjadi sangat penting karena perubahan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian (Ningsih et al., 2018). Menurut penelitian (wibowo, 2022)

keynes memberikan pernyataannya bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan hidup yang melebihi batas kemampuan ekonominya kondisi tersebut umumnya sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di Jawa Timur penguatan perekonomian tercerminkan dari meningkatnya PDRB per kapita pada tahun 2025. PDRB per kapita Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 6,54 persen di bandingkan tahun sebelumnya (BPS Jawa Timur, 2025). Permintaan ini berpotensi mendorong permintaan agregat, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Jawa Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

**Gambar 5 Data Persentase Tingkat Inflasi**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penurunan dari angka inflasi 6,96% pada tahun 2010 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Tahun 2020 angka inflasi 1,44 % angka tersebut mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut tercapai meskipun menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor. Pada tahun 2022 inflasi di Jawa Timur melonjak mencapai 6,52 % menunjukkan adanya percepatan kenaikan harga cukup

signifikan. Hal tersebut terjadi karena naiknya harga BBM di Indonesia khususnya jenis pertalite yaitu pada tanggal 03 September 2022. Harga pertalite yang tadinya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Permintaan masyarakat akan BBM yang tinggi sementara penyediaan barang mengalami kekurangan sehingga harga barang tersebut menjadi naik maka timbul inflasi di Jawa Timur (Lestari & Asyiqin, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur 2010 – 2025”.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 – 2025 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 – 2025 ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 – 2025 ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka. Dan inflasi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010 – 2025 ?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian dalam studi empiris ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010–2025.
  - b. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2025.
  - c. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2025.
  - d. Menilai secara simultan pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2025.
2. Manfaat Penelitian :
- a. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan inflasi dengan tingkat kemiskinan.
  - b. Bagi Universitas  
Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dan menjadi kontribusi ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan.
  - c. Bagi Peneliti yang akan datang  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan pendekatan, variabel, atau wilayah kajian yang berbeda.